



DAFTAR BACAAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Abdurrahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana baru di Indonesia, Alumni, Bandung, 1980
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi II, Cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Andi Hamzah-RM Surachman, Pre-trial Justice Dcretionary justice dalam KUHAP berbagai negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, Hukum Aacara Pidana Indonesia Dalam Buku Teori Dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus,
- A. Karim, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid II, Jakarta Djambatan, 1982
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2003
- HMA Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Edisi Revisi, UMM | Malang, 2011
- H. Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Gita Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Harry Pratama Teguh, Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2016
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai> Asas-lex specialis-derograt-legi generalis dilihat pada tanggal 23 januari 2018
- <http://kkbi.web.id/Saksi> diakses pada tanggal 10 April 2017 pada puku, 22:55
- I Dewa GD, Saputra Valentino Puja, Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi Pelaku/Justice Colaborator, <http://Jurnal.Unsrat.ac.id/index.php/Lexetsocietatis/articel/view/2453>, diakses Pada Tanggal 22 Januari 2018
- J. M. Van Bemmelen, Hukum Aacara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Edisi II, Cet VII, Jakarta, 2013
- Kenny Krisna Mukti, Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 1751/Pid B/2012, Jakarta Pusat, Tentang Penerapan Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Terhadap Ketentuan Pasal 112 Jo Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 di kaitkan dengan Prinsip Unus Testis Nullus Testis (Skripsi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2013)
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- Martin Prodjoharmidjojo, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, Pradya, jakarta
- M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Peranan KUHAP(Pemeriksaan dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M. Yahya Harahap, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid 2, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. VII, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet 12, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, Kamus Besar indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, jakarta,1993
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa, Gramedia, 2012
- Tim Penerjemah PHBN, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Cet II, Setara Pres, malang, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Aacara Pidana Indonesia, Cet 10, Sumur Bandung, Bandung, 1981

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik